



REPUBLIK INDONESIA

**MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
BETWEEN
THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND
THE MINISTRY OF NATIONAL DEFENCE OF
THE LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC
ON
COOPERATION IN THE FIELD OF DEFENCE**

The Ministry of Defence of the Republic of Indonesia and the Ministry of National Defence of The Lao People's Democratic Republic hereinafter referred to as the "Parties";

Desiring to enhance and strengthen the existing bilateral relations between the two countries, as the ASEAN Member States, through cooperative activities in the field of defence in the spirit of mutual trust and understanding;

Affirming that friendly relations and cooperation between the Parties will contribute to international peace and security by means of creating mutual confidence, understanding and cooperation in international relations;

Enhancing the long lasting relationship between the Government of the Republic of Indonesia and The Lao People's Democratic Republic on various fields of defence and military-related cooperation;

Noting that the enhancing and strengthening of defence cooperation will contribute to the mutually beneficial relations of both National Defences;

Pursuant to the prevailing laws and regulations of the two countries;

Have reached the following understanding:

**ARTICLE 1
PURPOSE**

The purpose of this Memorandum of Understanding is intended to provide a general framework for promoting bilateral cooperation in the field of defence between the Parties in areas of mutual interest, based on the principles of equality, mutual benefit and full respect of sovereignty and territorial integrity.

ARTICLE 2 SCOPE OF COOPERATION

The scope of cooperation of this Memorandum of Understanding may include:

1. Exchange of visits of delegations between two defence and Armed Forces at various levels;
2. Exchange of information in the field of defence cooperation or exchange views on matters of common interest related to national, regional and international security;
3. Promoting capacity building, including human resources development; and
4. Other areas of mutually agreed upon by the Parties.

ARTICLE 3 PROTECTION OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

1. The Parties shall prevent unauthorized use and transfer of intellectual property rights transferred, exchanged or generated under this Memorandum of Understanding in accordance with respective national laws and regulations of their countries as well as the international agreement to which their countries are party.
2. The protection and distribution of intellectual property rights including protection of a third party's legitimate right, as well as the consideration of equitable portion of ownership based on the contribution of the respective Parties, shall be arranged through separate written arrangements by the Parties on the specific areas of cooperation.

ARTICLE 4 FINANCIAL ARRANGEMENTS

Unless decided otherwise by the Parties, each Party shall bear its own expenses in the implementation of this Memorandum of Understanding and in accordance with its budgetary allocations.

ARTICLE 5 SETTLEMENT OF DISPUTES

Any disputes or differences arising from the interpretation or implementation of any provisions of this Memorandum of Understanding shall be settled amicably through mutual consultation or negotiation between the Parties.

ARTICLE 6 AMENDMENTS

This Memorandum of Understanding may be amended by the mutual written consent of the Parties and shall form as an integral part of this Memorandum of Understanding and shall come into force on the receipt of the last written notification through diplomatic channels.

ARTICLE 7 ENTRY INTO FORCE AND TERMINATION

1. This Memorandum of Understanding shall enter into force on the date of the last written notification through diplomatic channels on accomplishment by the Parties of proper internal states procedures.
2. This Memorandum of Understanding shall remain in valid for period of 5 (five) years and shall automatically be extended for subsequent periods of 5 (five) years. Either party may terminate the Memorandum of Understanding at any time by giving written notification through diplomatic channels at least 6 (six) months prior to the date of its intended termination.
3. Termination of this Memorandum of Understanding shall not affect the validity or duration of any activities that were ongoing prior to the termination, unless agreed otherwise by the Parties.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Memorandum of Understanding.

DONE at Jakarta, on this day 11 DECEMBER, 2019 in the Indonesian, Lao and English languages, all the texts being equally authentic. In case of divergence of interpretation of this Memorandum of Understanding, the English text shall prevail.

FOR THE MINISTRY OF
DEFENCE OF THE REPUBLIC OF
INDONESIA



PRABOWO SUBIANTO
MINISTER OF DEFENCE OF THE
REPUBLIC OF INDONESIA

FOR THE MINISTRY OF NATIONAL
DEFENCE OF THE LAO PEOPLE'S
DEMOCRATIC REPUBLIC



GENERAL CHANSAMONE CHANYALATH
MINISTER OF NATIONAL DEFENCE
LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC



REPUBLIK INDONESIA

**MEMORANDUM SALING PENGERTIAN
ANTARA
KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
DAN
KEMENTERIAN PERTAHANAN NASIONAL
REPUBLIK DEMOKRATIK RAKYAT LAOS
MENGENAI
KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN**

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Nasional Republik Demokratik Rakyat Laos selanjutnya disebut sebagai "Para Pihak";

Berkeinginan untuk meningkatkan dan memperkuat hubungan bilateral yang ada antara kedua negara, sebagai Negara Anggota ASEAN, melalui kegiatan kerja sama di bidang pertahanan berdasarkan semangat saling percaya dan pengertian.

Menegaskan bahwa hubungan dan kerja sama yang bersahabat antara Para Pihak akan berkontribusi pada perdamaian internasional dan keamanan dengan cara menciptakan rasa saling percaya, saling pengertian, dan kerja sama dalam hubungan internasional;

Meningkatkan hubungan jangka panjang antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Demokratik Rakyat Laos dalam berbagai ranah pertahanan dan kerja sama terkait militer;

Mencatat bahwa peningkatan dan penguatan kerja sama pertahanan akan berkontribusi pada hubungan yang saling menguntungkan bagi kedua Pertahanan Nasional;

Sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dari kedua negara;

Telah mencapai kesepakatan sebagai berikut:

**PASAL 1
TUJUAN**

Tujuan Memorandum Saling Pengertian ini adalah untuk menyediakan kerangka kerja dalam rangka meningkatkan kerja sama bilateral di bidang pertahanan antara Para Pihak dalam hal yang menjadi kepentingan bersama berdasarkan prinsip kesetaraan, keuntungan bersama, dan penghormatan penuh atas kedaulatan dan keutuhan wilayah.

PASAL 2

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup kerja sama Memorandum Saling Pengertian ini meliputi:

1. Saling kunjung delegasi antara kedua institusi pertahanan dan Angkatan Bersenjata di berbagai tingkatan;
2. Pertukaran informasi di bidang kerja sama pertahanan atau pertukaran pandangan atas permasalahan yang menjadi kepentingan bersama terkait dengan keamanan nasional, regional, dan internasional;
3. Peningkatan pembangunan kapasitas, termasuk pengembangan sumber daya manusia; serta
4. Bidang lain yang disetujui bersama oleh Para Pihak.

PASAL 3

PELINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

1. Para Pihak harus mencegah penggunaan atau pengalihan hak kekayaan intelektual yang tidak sah yang dialihkan, dipertukarkan, atau dihasilkan dari Memorandum Saling Pengertian ini sesuai dengan hukum dan peraturan nasional masing-masing negara serta perjanjian internasional yang negaranya menjadi pihak.
2. Pelindungan dan distribusi hak kekayaan intelektual termasuk pelindungan terhadap hak pihak ketiga, serta pertimbangan bagian yang sama dari kepemilikan berdasarkan pada kontribusi masing-masing Pihak, harus diatur melalui perjanjian tertulis yang terpisah oleh Para Pihak mengenai bidang kerja sama khusus.

PASAL 4

PENGATURAN KEUANGAN

Kecuali diputuskan lain oleh Para Pihak, masing-masing Pihak harus menanggung sendiri biaya pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini sesuai dengan alokasi anggarannya.

PASAL 5

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan atau perbedaan yang timbul dari interpretasi atau pelaksanaan ketentuan dalam Memorandum Saling Pengertian ini akan diselesaikan secara damai melalui konsultasi atau negosiasi bersama antara Para Pihak.

PASAL 6 AMENDEMEN

Memorandum Saling Pengertian ini dapat diamendemen berdasarkan persetujuan bersama oleh Para Pihak dan harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Memorandum Saling Pengertian ini dan harus berlaku pada saat diterimanya pemberitahuan tertulis terakhir tentang terpenuhinya prosedur yang diperlukan dalam negeri masing-masing oleh Para Pihak.

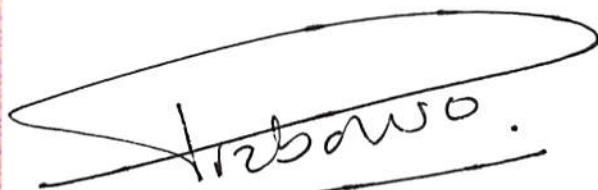
PASAL 7 PEMBERLAKUAN DAN PENGAKHIRAN

1. Memorandum Saling Pengertian ini mulai berlaku pada tanggal diterimanya pemberitahuan tertulis terakhir yang diserahkan Para Pihak melalui saluran diplomatik atas pemenuhan persyaratan domestik masing-masing Pihak untuk pemberlakuan Memorandum Saling Pengertian ini.
2. Memorandum Saling Pengertian ini akan tetap berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan akan secara otomatis diperpanjang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun berikutnya. Salah satu Pihak dapat menghentikan Memorandum Saling Pengertian ini setiap saat dengan memberikan pemberitahuan tertulis melalui saluran diplomatik sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang diinginkan.
3. Pengakhiran Memorandum Saling Pengertian ini tidak akan berdampak pada keabsahan atau jangka waktu kegiatan yang sedang berlangsung sebelum pengakhiran, kecuali ditentukan lain oleh Para Pihak.

Sebagai bukti, yang bertanda tangan di bawah ini, dengan diberi kuasa oleh masing-masing Pemerintah, telah menandatangani Memorandum Saling Pengertian Ini.

Ditetapkan di Jakarta pada hari ini 11 Desember, tahun 2019,
bahasa Indonesia, bahasa Lao, dan bahasa Inggris; semua teks sama-sama autentik.
Apabila terdapat perbedaan interpretasi dari Memorandum Saling Pengertian ini,
naskah dalam bahasa Inggris yang berlaku.

**UNTUK KEMENTERIAN PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA**



**PRABOWO SUBIANTO
MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA**

**UNTUK KEMENTERIAN PERTAHANAN
NASIONAL REPUBLIK DEMOKRATIK
RAKYAT LAOS**



**GENERAL CHANSAMONE CHANYALATH
MENTERI PERTAHANAN NASIONAL
REPUBLIK DEMOKRATIK RAKYAT LAOS**



REPUBLIK INDONESIA

ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ

ລະຫວ່າງ

ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ແຫ່ງ ສາທາລະນະລັດ ອິນໂດເນເຊຍ

ແລະ

ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ແຫ່ງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ

ກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືໃນຂົງເຂດວຽກງານປ້ອງກັນຊາດ

ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ແຫ່ງ ສາທາລະນະລັດ ອິນໂດເນເຊຍ ແລະ ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ແຫ່ງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ຕໍ່ໄປນີ້ເອີ້ນວ່າ: “ສອງຝ່າຍ”.

ໂດຍຄວາມປາຖະໜາ ເພື່ອເພີ່ມທະວີ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍສາຍພົວພັນລະຫວ່າງສອງປະເທດ ໃນຖານະ ປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ ໂດຍຜ່ານການຮ່ວມມືໃນຂົງເຂດວຽກງານປ້ອງກັນຊາດ ດ້ວຍຄວາມໄວ້ວາງໃຈ ແລະ ເຂົ້າໃຈເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ;

ໂດຍຍຶດໝັ້ນ ການເສີມຂະຫຍາຍສາຍພົວພັນມິດຕະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງສອງຝ່າຍ ເພື່ອ ປະກອບສ່ວນໃນການເສີມສ້າງສັນຕິພາບ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງສາກົນ ໂດຍການສ້າງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ, ຄວາມເຂົ້າໃຈເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ແລະ ຮ່ວມມືກັນບັນຫລັກການພົວພັນຮ່ວມມືສາກົນ;

ໂດຍການເສີມຂະຫຍາຍ ສາຍພົວພັນມິດຕະພາບທີ່ມີມາແຕ່ດົນນານ ລະຫວ່າງ ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສາທາລະນະລັດ ອິນໂດເນເຊຍ ແລະ ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ໃນ ຂົງເຂດການຮ່ວມມືດ້ານການທະຫານ ແລະ ດ້ານວຽກງານປ້ອງກັນຊາດ;

ໂດຍຍຳຄືນວ່າ ການເສີມຂະຫຍາຍການຮ່ວມມືທາງດ້ານວຽກງານປ້ອງກັນຊາດ ຈະປະກອບສ່ວນສ້າງສາຍ ພົວພັນດ້ານປ້ອງກັນຊາດຂອງສອງກອງທັບ ບົນພື້ນຖານຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຜົນປະໂຫຍດ;

ໂດຍສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບຫຼັກການຂອງທັງສອງປະເທດ;

ໄດ້ບັນລຸຄວາມເຂົ້າໃຈກັນດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

ມາດຕາ 1:

ຈຸດປະສົງ

ຈຸດປະສົງຂອງບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈສະບັບນີ້ ແມ່ນແນໃສ່ເພື່ອກຳນົດຂອບເຂດໃນການສົ່ງເສີມການ ພົວພັນຮ່ວມມືສອງຝ່າຍໃນຂົງເຂດວຽກງານປ້ອງກັນຊາດ ບົນພື້ນຖານຫຼັກການຄວາມສະເໝີພາບ, ຕ່າງຝ່າຍ ຕ່າງມີຜົນປະໂຫຍດ, ເຄົາລົບອຳນາດອະທິປະໄຕ ແລະ ຜົນແຜ່ນດິນອັນຄົບຖ້ວນຂອງກັນ ແລະ ກັນ.

ມາດຕາ 2:

ຂອບເຂດການຮ່ວມມື

ຂອບເຂດການຮ່ວມມືຂອງບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈສະບັບນີ້ປະກອບມີ:

1. ແລກປ່ຽນການຍ້ຽມຢາມຂອງຄະນະຜູ້ແທນການທະຫານສອງຝ່າຍໃນຂັ້ນຕ່າງໆ;
2. ແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານໃນຂົງເຂດທີ່ມີການຮ່ວມມືດ້ານວຽກງານປ້ອງກັນຊາດ ຫຼື ບັນຫາຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ການທະຫານຂອງພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນທີ່ສອງຝ່າຍໃຫ້ຄວາມສົນໃຈຮ່ວມກັນ;
3. ສົ່ງເສີມການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ, ລວມທັງການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ;
4. ຂົງເຂດອື່ນໆທີ່ສອງຝ່າຍເຫັນດີຮ່ວມກັນ.

ມາດຕາ 3:

ການປົກປ້ອງຊັບສິນທາງປັນຍາ

1. ທັງສອງຝ່າຍຈະປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ມີການນຳໃຊ້ ແລະ ມອບໂອນໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຕໍ່ກັບສິດໃນຊັບສິນທາງປັນຍາທີ່ໄດ້ມອບໂອນ, ແລກປ່ຽນກັນ ຫລື ສ້າງຂຶ້ນພາຍໃຕ້ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈສະບັບນີ້ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບຫຼັກການຂອງທັງສອງປະເທດ ລວມເຖິງສັນຍາສາກົນທີ່ທັງສອງປະເທດເປັນພາຄີ.
2. ການປົກປ້ອງ ແລະ ເຜີຍແຜ່ສິດໃນຊັບສິນທາງປັນຍາ ລວມທັງການປົກປ້ອງສິດທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍຂອງຝ່າຍທີສາມ ລວມເຖິງການພິຈາລະນາໃນການແບ່ງປັນຊັດສ່ວນຜົນປະໂຫຍດທີ່ເໝາະສົມໃນຄວາມເປັນເຈົ້າຂອງຕໍ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວ ແມ່ນອີງໃສ່ການປະກອບສ່ວນຂອງແຕ່ລະຝ່າຍ ແລະ ຈະຕ້ອງໄດ້ເຮັດບົດບັນທຶກເປັນລາຍລັກອັກສອນຕ່າງຫາກໂດຍສອງຝ່າຍ ໃນຂົງເຂດສະເພາະຂອງການຮ່ວມມື.

ມາດຕາ 4:

ດ້ານການເງິນ

ແຕ່ລະຝ່າຍຈະຮັບຜິດຊອບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈສະບັບນີ້ ໂດຍອີງຕາມງົບປະມານຂອງຕົນ, ເວັ້ນເສຍແຕ່ສອງຝ່າຍໄດ້ມີການຕົກລົງກັນຕ່າງຫາກ.

ມາດຕາ 5:

ການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ

ທຸກຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ຫຼື ຄວາມບໍ່ເປັນເອກະພາບທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກການຕີຄວາມໝາຍ ຫລື ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈສະບັບນີ້ຈະໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂໂດຍຜ່ານການປຶກສາຫາລື ຫລື ການເຈລະຈາລະຫວ່າງສອງຝ່າຍ.

ມາດຕາ 6:

ການປັບປຸງ

ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈສະບັບນີ້ ສາມາດປັບປຸງໄດ້ໂດຍການເຫັນດີຢ່າງເປັນລາຍລັກອັກສອນຂອງສອງຝ່າຍ ແລະ ຈະກາຍເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈສະບັບນີ້ ແລະ ຈະມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ນັບແຕ່ໄດ້ຮັບໜັງສືແຈ້ງສະບັບສຸດທ້າຍ ໂດຍຜ່ານທາງການທຸດ.

ມາດຕາ 7:
ຜົນສັກສິດ ແລະ ການຍົກເລີກ

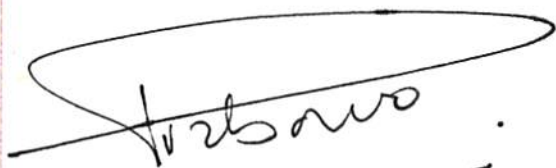
1. ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈສະບັບນີ້ ຈະມີຜົນສັກສິດນັບແຕ່ມີໄດ້ຮັບໜັງສືແຈ້ງສະບັບສຸດທ້າຍ ຜ່ານຊ່ອງທາງການທຸດ ພາຍຫລັງສໍາເລັດການດໍາເນີນຂັ້ນຕອນພາຍໃນຂອງທັງສອງຝ່າຍ.
2. ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈສະບັບນີ້ຈະມີອາຍຸນໍາໃຊ້ພາຍໃນເວລາ 05 ປີ ແລະ ຈະຕໍ່ໂດຍອັດຕະໂນມັດອີກ 05 ປີ, ຝ່າຍໃດຝ່າຍໜຶ່ງສາມາດສະເໜີຍົກເລີກບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈສະບັບນີ້ເວລາໃດກໍໄດ້ ໂດຍການແຈ້ງເປັນລາຍລັກອັກສອນຜ່ານທາງການທຸດໃຫ້ອີກຝ່າຍໜຶ່ງຊາບຢ່າງໜ້ອຍ 06 ເດືອນ ກ່ອນການຍົກເລີກບົດບັນທຶກດັ່ງກ່າວ.
3. ການຍົກເລີກບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈສະບັບນີ້ ຈະບໍ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ກຳນົດເວລາຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາກິດຈະກຳການຮ່ວມມືທີ່ພວມດໍາເນີນຢູ່ນັ້ນ ຈະດໍາເນີນໄປຈົນກວ່າຈະສໍາເລັດຕາມໄລຍະເວລາ ທີ່ໄດ້ຕົກລົງກັນໄວ້ ເວັ້ນເສຍແຕ່ມີການຕົກລົງຮ່ວມກັນຂອງສອງຝ່າຍ.

ເພື່ອເປັນຫລັກຖານ, ຜູ້ຕາງໜ້າທີ່ໄດ້ຮັບມອບສິດອຳນາດຢ່າງຖືກຕ້ອງຈາກລັດຖະບານຂອງຕົນ ຈຶ່ງໄດ້ລົງນາມໃນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈສະບັບນີ້.

ສ້າງຂຶ້ນທີ່ ນະຄອນຫຼວງຈາກາຕາ ໃນວັນທີ 11 ເດືອນ 12 ປີ 2019 ເຮັດເປັນພາສາອິນໂດເນເຊຍ, ພາສາລາວ ແລະ ພາສາອັງກິດ, ແຕ່ລະສະບັບແມ່ນມີຄຸນຄ່າເທົ່າທຽມກັນ, ໃນກໍລະນີມີການຕີຄວາມໝາຍຂອງບົດບັນທຶກສະບັບນີ້ແຕກຕ່າງກັນ ໃຫ້ຖືເອົາພາສາອັງກິດເປັນບ່ອນອີງ.

ຕາງໜ້າກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ
ແຫ່ງ ສາທາລະນະລັດ ອິນໂດເນເຊຍ

ຕາງໜ້າກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ
ແຫ່ງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ



ປຣາໂຍໂອ-ຊຸບຽນໂຕ
ລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດ



ຟິນເອກ ຈັນສະໝອນ ຈັນຍາລາດ
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ